

## PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN AGRIBISNIS SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN PERTANIAN SERTA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

### *Test Analysis of Different Level of Efficiency of People's Credit Sugar Cane Farming and Independent People's Sugar Cane Business in Kediri City*

Dewi Anggun Oktaviani<sup>1\*</sup>, Novita Lidyana<sup>1</sup>

<sup>1\*</sup>Department Agribusiness, Faculty of Agriculture,  
Universitas Panca Marga Probolinggo, East Java, Indonesia

\*Correspondence author: [dewianggunoktaviani@upm.ac.id](mailto:dewianggunoktaviani@upm.ac.id)

#### ABSTRACT

*The agricultural sector makes a significant contribution to the Indonesian economy, but this sector is also the sector with the number of poor families reaching 23.46%. Farmer institutions play an important role in supporting agricultural development and are the first stage in realizing farmer welfare. The purpose of this article is to present a perspective on the role and function of agribusiness institutions as an effort to develop sustainable agriculture and improve farmer welfare. It cannot be denied that various problems in the agricultural sector have proven capable of being solved through an institutional approach. Technology, natural resources and human resources are three important factors that are interrelated in agricultural development. These three factors need to be covered by an institution which is a driving factor and has a role and function as a unified system in agricultural development and farmer welfare.*

**Keywords:** *Agribusiness Institutions, Farmer Welfare, Agricultural Development, Improvement, Agricultural Sector.*

#### ABSTRAK

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, namun sektor ini juga merupakan sektor dengan jumlah keluarga miskin mencapai 23,46%. Kelembagaan petani memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan pertanian dan merupakan tahap pertama dalam mewujudkan kesejahteraan petani. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengemukakan perspektif peran dan fungsi kelembagaan agribisnis sebagai upaya pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani. Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai masalah-masalah di sektor pertanian terbukti mampu dipecahkan melalui pendekatan kelembagaan. Teknologi, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia merupakan tiga faktor penting yang saling terkait dalam pembangunan pertanian. Ketiga faktor tersebut perlu dipayungi oleh suatu kelembagaan yang merupakan faktor penggerak dan memiliki peran serta fungsi sebagai satu kesatuan sistem dalam pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani.

**Kata Kunci:** Kelembagaan Agribisnis, Kesejahteraan Petani, Pembangunan Pertanian, Peningkatan, Sektor Pertanian.

#### PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi tulang punggung dan berkontribusi cukup penting bagi perekonomian Indonesia, namun sektor ini juga merupakan sektor dengan jumlah keluarga miskin yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan sektor lainnya. Sebagai gambaran, 23,46% penduduk di Indonesia pada sektor pertanian merupakan keluarga miskin, itu artinya peningkatan kesejahteraan petani menjadi prioritas utama yang perlu untuk diupayakan. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan/organisasi petani merupakan tahap pertama dalam mewujudkan kesejahteraan petani dan menjadi salah satu program pemerintah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani (Handayani, 2020).

Kelembagaan di tingkat petani merupakan suatu organisasi yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani yang memiliki fungsi utama untuk memperjuangkan kepentingan petani, mencakup asosiasi dan dewan komoditas pertanian, serta gabungan kelompok tani (gapoktan) atau kelompok tani (poktan). Kelembagaan petani memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan pertanian, sehingga keberadaannya perlu mendapat perhatian dan pengelolaan yang baik agar peranan dan fungsinya dapat berjalan secara optimal (Handayani, 2020).

Secara mendasar, kebijakan pembangunan pertanian memuat misi bahwa sektor pertanian harus mampu menyediakan dan mencukupi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat baik kualitas maupun jumlahnya. Di samping itu sektor pertanian juga harus mampu menjadi pendorong berkembangnya berbagai kegiatan, baik disektor hulu maupun hilir, pada setiap pembangunan wilayah pertanian (Rukhsan, 2021).

Sektor pertanian harus dan butuh diperkuat agar peran strategis sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan tetap tercapai selain itu, sektor pertanian juga berperan dalam penyediaan bahan baku untuk industri, menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha, serta peran konsumsi yaitu sebagai konsumen produk-produk industri (alat dan mesin pertanian atau alsintan dan sarana produksi) bahkan juga berperan sebagai penyumbang devisa bagi negara (Sedana, 2019).

Pembangunan pertanian, khususnya di Indonesia diarahkan menuju pembangunan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), yang merupakan pengembangan dari suatu sistem pertanian yang dapat dilaksanakan secara terus-menerus dan mampu bertahan hingga ke generasi berikutnya tanpa merusak alam. Pertanian berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai usaha pertanian yang memanfaatkan dan sekaligus melestarikan sumberdaya guna menghasilkan produksi dan produktivitas sumberdaya secara optimal sepanjang masa (Lagiman, 2021).

Bagi petani, pertanian berkelanjutan diharapkan mampu menghasilkan produk secara stabil dengan menggunakan sarana produksi yang relatif rendah sehingga dapat memberikan keuntungan yang optimal dan pendapatan ekonomi yang layak bagi kehidupan keluarga serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara umum (Ikhsan et al., 2023).

Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan perspektif peran dan fungsi kelembagaan sebagai upaya pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Dari tulisan ini diharapkan dapat melengkapi kajian ekonomi dan pertanian secara umum.

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian untuk artikel "Peran dan Fungsi Kelembagaan Agribisnis sebagai Upaya Pembangunan Pertanian serta Peningkatan Kesejahteraan Petani" dimulai dengan mencari sumber bacaan yang berkaitan dengan topik tersebut.

Langkah pertama adalah mengidentifikasi literatur yang relevan tentang kelembagaan agribisnis, pembangunan pertanian, dan kesejahteraan petani. Setelah itu, kita menganalisis informasi dari literatur tersebut untuk menemukan pola, tren, dan temuan kunci yang bisa memberikan pemahaman lebih baik tentang hubungan antara kelembagaan agribisnis dan kesejahteraan petani.

Langkah kedua dalam metodologi ini adalah menggabungkan informasi dari berbagai literatur untuk membentuk gambaran besar atau kerangka konseptual. Proses ini membantu kita merinci peran dan fungsi kelembagaan agribisnis yang dapat berkontribusi pada pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Keseluruhan proses ini membentuk dasar untuk membahas hasil temuan dalam artikel, memberikan informasi yang kuat untuk mendukung pembahasan mengenai pentingnya kelembagaan agribisnis dalam konteks pembangunan pertanian.

Langkah terakhir adalah mengevaluasi informasi yang telah dikumpulkan dari literatur. Ini melibatkan penilaian kritis terhadap keakuratan dan relevansi informasi. Dengan menilai kualitas literatur, penelitian ini memastikan bahwa temuan yang ditemukan dapat diandalkan dan menjadi dasar yang solid untuk mendukung pernyataan mengenai peran dan fungsi kelembagaan agribisnis dalam upaya pembangunan pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Kelembagaan

Lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisasi dan mengacu pada cita-cita dan tujuan bersama dengan tata cara atau aturan main yang dibakukan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Kelembagaan dalam kehidupan bermasyarakat terbentuk akibat adanya dorongan terkait unsur modal sosial yaitu kepercayaan (*trust*), jejaring sosial, dan pranata sosial. Peran dan fungsi kelembagaan menjadi sangat penting dalam pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif karena melalui pengembangan kelembagaan terbukti mampu mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan seperti kemiskinan. Kelembagaan juga merupakan faktor penggerak yang mendorong pemberdayaan dan

pengembangan masyarakat dari segi ekonomi maupun sosial sehingga mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera dan memiliki daya saing (Syofian et al., 2020).

Kepercayaan, Hubungan saling percaya (*trust*) terbentuk karena adanya kejujuran dan toleransi antara lembaga (panitia) dan petani dalam menjalin kerja sama. Kondisi saling mempercayai ini merupakan penunjang sekaligus jaminan akan kelancaran usaha seperti penyaluran dan pembayaran saprodi, pembiayaan budidaya, penjualan hasil pertanian dan proses alih informasi dan teknologi.

Jejaring sosial, Jejaring sosial (*social networks*), meliputi adanya kerjasama antar petani, partisipasi dan hubungan timbal balik antara lembaga dan petani, serta solidaritas.

Pranata sosial, Pranata (*institutions*) meliputi aturan, nilai-nilai, norma, serta perilaku yang menentukan pola tindakan dan hubungan sosial, termasuk juga kesatuan sosial-kesatuan sosial yang merupakan wujud kongkrit dari lembaga tersebut.

Kelembagaan termasuk dalam sistem agribisnis, diharapkan dapat bekerja dan berfungsi dengan baik di dalam sistem sosial masyarakat, serta memiliki tujuan untuk mendorong kemajuan masyarakat (Rukhsan, 2021). Kelembagaan petani terbentuk berdasarkan kerjasama yang dilakukan oleh petani dalam mengelola sumberdaya pertanian, antara lain dalam hal (Anantanyu, 2011):

Pembelian (*buying*), kerja sama ini dilakukan agar petani mendapatkan harga yang lebih murah. Penggunaan alsintan, kerja sama dalam penggunaan alsintan dilakukan agar dapat menurunkan biaya atas pembelian alat tersebut. Kerjasama usahatani, kerja sama dalam usaha tani dimaksudkan untuk menghasilkan keseragaman produk sehingga akan diperoleh keuntungan maksimal. Pemrosesan, kerja sama dalam proses pemrosesan produk baik produk primer, maupun barang jadi menjadi lebih cepat, murah, dan efisien. Pemasaran, kerja sama ini dilakukan untuk meyakinkan konsumen terhadap kualitas produk yang dihasilkan sehingga mampu meningkatkan posisi tawar petani. Kerja sama pelayanan, kerja sama ini dilakukan untuk menyediakan pelayanan bagi kepentingan anggota sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerja sama bank, kerja sama dengan lembaga perbankan dilakukan untuk menyediakan modal usaha. Kerja sama multi tujuan, kerja sama ini dikembangkan atas dasar minat yang sama dari petani. Kegiatan bersama oleh para petani merupakan salah satu faktor yang memperlancar pembangunan pertanian (Saridakis et al., 2021).

### **Kelembagaan Agribisnis**

Kelembagaan adalah dasar terbentuknya modal sosial yang dapat memfasilitasi adanya kerja sama dengan saling percaya dengan norma dan aturan yang disepakati bersama. Kelembagaan agribisnis dalam sistem pertanian meliputi kelembagaan pada subsistem hulu, usaha tani, hilir dan pendukung (Ayesha et al., 2020).

Kelembagaan pada subsistem hulu. Kelembagaan pada subsistem agribisnis hulu meliputi lembaga yang menyediakan input produksi dan sarana produksi (saprodi) pertanian meliputi industri benih dan bibit, industri agrootomotif (perdagangan mesin dan peralatan pertanian atau alsintan), dan perdagangan agrokimia (pupuk, pestisida dan lain sebagainya).

Kelembagaan pada subsistem usahatani. Kelembagaan pada subsistem usahatani meliputi kelembagaan kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan). Tujuan kegiatan usaha tani yaitu untuk menghasilkan produk pertanian atau produk primer sebagai bahan baku bagi subsistem agribisnis hilir.

Kelembagaan pada subsistem hilir. Kelembagaan pada subsistem hilir meliputi kegiatan ekonomi yang mengolah produk primer (hasil pertanian) untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah, baik berupa produk antara ataupun produk akhir, serta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional.

Kelembagaan pada subsistem penunjang. Kelembagaan penunjang adalah lembaga yang melayani, mendukung, serta mengembangkan kegiatan pertanian mulai dari subsistem hulu, hingga subsistem hilir. Lembaga terkait dalam kegiatan ini adalah lembaga penyuluh pertanian dan lembaga penyediaan modal. Tujuan kegiatan penyuluhan adalah mengubah perilaku masyarakat agar dapat membantu memperbaiki mutu hidup khususnya untuk dirinya sendiri dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

### Peran dan Fungsi Kelembagaan

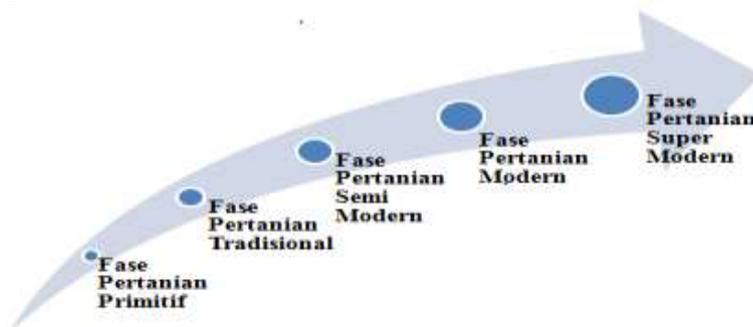
Kelembagaan merupakan suatu keseluruhan aktivitas, organisasi dan pola-pola ideal, yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar masyarakat. Suatu kelembagaan dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga lembaga mempunyai fungsi. sebagai dasar untuk mencapai tujuan bersama kelembagaan memiliki beragam peran dan fungsi, antara lain (Anantanyu, 2011).

Peran dalam organisasi. Lembaga berperan sebagai mediator antara masyarakat dan negara. Peran sumberdaya. Lembaga berperan sebagai mobilisator sumberdaya lokal mencakup informasi, material, modal, dan tenaga kerja serta pengelolaannya dalam rangka pencapaian tujuan masyarakat. Peran pelayanan Kelembagaan berperan sebagai penggerak, pembangkit minat dan sikap, penghimpun dan penyalur sarana produksi, serta sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang menggambarkan koordinasi permintaan masyarakat lokal serta tujuan pembangunan. Peran antar organisasi Kelembagaan berperan untuk memfasilitasi petani dan birokrasi, pelaku usaha atau organisasi luar masyarakat agar dapat bekerjasama secara produktif.

### Dinamika Perkembangan Pertanian

Fungsi strategis sektor pertanian adalah sebagai sumber produksi berbagai jenis bahan pangan menjadikan pertanian diyakini merupakan sumber kehidupan. Fungsi tersebut tidak akan pernah dapat digantikan oleh sektor lain sampai kapanpun. Tanpa adanya produk pertanian tentu akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya bahkan hingga terancam kepunahan. Oleh sebab itu, pertanian senantiasa menjadi prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Kemajuan pertanian memberi kontribusi besar bagi jaminan kecukupan dan ketersediaan pangan, kelayakan hidup, peningkatan status kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta stabilitas pertahanan dan keamanan nasional (Dumasari, 2020).

Pertanian dikenal semenjak manusia memanfaatkan berbagai jenis tanaman, hewan dan ikan sebagai bahan pangan. Selama ini kita mengenal lima fase perkembangan pertanian (Gambar 1) yaitu pertanian primitif, pertanian tradisional, pertanian semi modern, pertanian modern dan pertanian super modern. Kelima fase tersebut dibedakan berdasarkan tingkat primitif dan ilmiah dalam menggunakan terapan teknologi (Dumasari, 2020).



**Gambar 1.** Fase Perkembangan Pertanian (Dumasari, 2020)

Pertanian primitif memiliki ketergantungan bahan pangan pada ketersediaan sumberdaya alam yang tinggi, dimana manusia hanya berburu, mengumpulkan, dan meramu berbagai bahan pangan dari alam. Pada pertanian primitif, intervensi manusia terhadap proses produksi langka sekali.

Pertanian Tradisional, Tuntutan peningkatan kebutuhan pangan akibat bertambahnya jumlah populasi manusia dan kesulitan berburu hewan, mengajarkan manusia tentang teknik penjinakan. Kegiatan bertani mulai diatur dengan cara sederhana. Budidaya tanaman, hewan dan ikan dilakukan dengan teknik yang dipelajari secara turun temurun serta dari pengalaman sehari-hari. Pada pertanian primitif, intervensi manusia terhadap proses produksi relatif sedikit (Sibuea et al., 2022).

Pada pertanian semi modern, teknik bertani semakin intensif dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sederhana yang lebih beragam, petani mulai meningkatkan hasil panen melalui teknik intensifikasi dan ekstensifikasi. Kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas lahan melalui teknologi mekanisasi, sedangkan ekstensifikasi ditunjukkan dari kegiatan perluasan lahan pertanian

dengan memanfaatkan lahan marginal, lahan tidur, lahan dengan kemiringan tinggi, rawa-rawa serta padang rumput.

Pertanian modern sudah mengenal penerapan teknologi berdasarkan prinsip ilmiah, pemanfaatan mekanisasi pertanian bergerak cepat dalam pertanian modern sehingga petani dituntut untuk meningkatkan keterampilannya dalam mengendalikan ragam teknologi produksi. Difusi teknologi pada pertanian modern mengenai seluruh sub sektor pertanian hortikultura, kehutanan, kelautan, perikanan perkebunan, peternakan, tanaman hias, serta tanaman pangan.

Pertanian super modern tidak dapat dilepaskan dari inovasi teknologi informasi seperti *Artificial Intelligence* (AI), internet, program penyimpanan data pada komputer, dan robotika yang berpotensi mengubah pertanian menuju generasi 4.0. Intensifikasi berkelanjutan dan pro petani, serta ramah lingkungan. Pertanian berkelanjutan merupakan sistem pertanian yang mengelola sumberdaya pertanian dengan mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam.

### **Peran Lembaga Terhadap Pembangunan Pertanian**

Pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah peningkatan produktivitas lahan dan tanaman untuk meningkatkan pendapatan keluarga petani melalui berbagai upaya baik secara internal maupun eksternal petani. Pembangunan pertanian sangat membutuhkan ketersediaan sumberdaya alam yang berkualitas serta berkecukupan agar dapat dikelola untuk menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh manusia. Pengelolaan sumberdaya usahatani oleh petani menyangkut pengaturan dan pengelolaan faktor-faktor produksi (masukan atau input produksi), proses produksi, serta pengolahan hasil (luaran) sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi (Anantanyu, 2011).

Pada dasarnya pembangunan pertanian meliputi pengembangan dan peningkatan empat faktor utama yaitu sumberdaya alam, teknologi, sumberdaya manusia, dan kelembagaan. Keempat faktor tersebut merupakan syarat kecukupan untuk mencapai peningkatan yang dikehendaki, artinya apabila salah satu dari keempat faktor tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, maka tujuan pembangunan tidak akan dapat tercapai (Anantanyu, 2011).

Peran kelembagaan dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian sangat menonjol dalam program intensifikasi dan peningkatan produksi pangan yang dituangkan dalam bentuk proyek dengan membangun kelembagaan. Apabila pembangunan pertanian dilaksanakan oleh suatu lembaga atau organisasi, di mana terdapat individu-individu dengan jiwa organisator menggabungkan pengetahuannya dalam tahap perencanaan serta implementasi inisiatif pembangunan pertanian tersebut maka peluang keberhasilan pembangunan pertanian menjadi semakin besar (Nasrul, 2012).

Kelembagaan pertanian yang kurang berperan dalam mendukung pengelolaan sumberdaya pertanian menyebabkan kegiatan pertanian sulit mencapai kondisi optimal. Untuk dapat mencapai efisiensi dan produktivitas yang optimal, dalam menjalankan usahanya petani harus bekerja sama secara kolektif, sehingga dibutuhkan pemahaman tentang kelembagaan khususnya di tingkat petani. Perubahan jaman dan tantangannya menuntut suatu lembaga yang lebih sesuai dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat petani serta mendukung pembangunan pertanian (Anantanyu, 2011).

### **Peran Lembaga Terhadap Kesejahteraan Petani**

Salah satu prasyarat petani untuk berpartisipasi dalam pembangunan pertanian adalah dengan menjadi petani unggul yang memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatan pertanian dan meningkatkan kapasitas individu melalui pengembangan kelembagaan (Anantanyu, 2011).

Peningkatan produktivitas pertanian tidak serta merta menjamin kesejahteraan bagi petani. Kesejahteraan petani dapat terwujud apabila terdapat kesetaraan pendapatan antara petani yang bergerak di sub sistem on farm dengan pelaku agribisnis di sub sektor hulu dan hilir. Sedangkan kesetaraan pendapatan hanya dapat dicapai apabila petani mampu peningkatan posisi tawarnya. Peningkatan posisi tawar petani dapat dilakukan dengan cara menghimpun kekuatan dalam suatu lembaga yang betul-betul mampu menyalurkan aspirasi petani. Lembaga ini dapat berfungsi dan berperan secara optimal apabila petani turut serta dan menjadi subjek dalam mengendalikan penumbuhan dan pengembangan lembaga tersebut (Nasrul, 2012).

Peningkatan posisi tawar petani dapat diupayakan dengan cara kolektifikasi produksi dan pemasaran produk. Hal ini dilakukan agar dapat diperoleh efisiensi produksi dengan skala yang lebih besar. Koordinasi dalam pemenuhan faktor produksi dan kemudahan dalam pengelolaan produksi dapat

dilakukan untuk penghematan biaya produksi. Kolektifikasi pemasaran dilakukan untuk mengkikis jaring-jaring tengkulak dengan tujuan membuat pola distribusi yang lebih efisien dengan memangkas rantai tata niaga yang merugikan petani (Akhmad, 2007; Nasrul, 2012).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kelembagaan merupakan suatu sistem hubungan sosial yang terorganisasi dan mengacu pada cita-cita dan tujuan bersama dengan tata cara atau aturan main yang dibakukan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Kelembagaan pertanian dapat dikelompokkan menjadi kelembagaan pada subsistem hulu, usaha tani, hilir, dan pendukung. Kelembagaan memiliki peran dan fungsi yang penting dalam pembangunan pertanian, yaitu sebagai mediator antara masyarakat dan negara, mobilisator sumberdaya lokal, penggerak, pembangkit minat dan sikap, penghimpun dan penyalur sarana produksi, serta sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

### Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan kelembagaan pertanian di Indonesia: Pemerintah perlu memberikan dukungan dan pembinaan yang lebih intensif kepada kelembagaan pertanian, terutama di tingkat petani. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan dana, pelatihan, dan pendampingan. Pemerintah dapat memberikan bantuan dana kepada kelembagaan pertanian untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, dan pengadaan sarana produksi.

Petani perlu didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengembangan kelembagaan pertanian. Petani perlu memiliki kesadaran akan pentingnya kelembagaan pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola kelembagaan pertanian.

Kelembagaan pertanian perlu dikembangkan dengan memperhatikan dinamika perkembangan pertanian. Kelembagaan pertanian harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sektor pertanian, seperti perkembangan teknologi dan perubahan pasar. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada petani yang aktif berpartisipasi dalam kelembagaan pertanian.

Dengan dukungan dan pembinaan yang intensif dari pemerintah serta kesadaran dan partisipasi yang lebih tinggi dari petani, diharapkan kelembagaan pertanian di Indonesia dapat berkembang secara optimal dan berperan lebih besar dalam pembangunan pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, S. (2007). Membangun gerakan ekonomi kolektif dalam pertanian berkelanjutan; perlawanan terhadap liberalisasi dan oligopoli pasar produk pertanian. *Tegalan Diterbitkan Oleh BABAD. Purwokerto. Jawa Tengah*.
- Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan petani: peran dan strategi pengembangan kapasitasnya. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 7(2).
- Ayesha, I., Rizal, A., & Gusvita, H. (2020). Analisis Kelembagaan Agribisnis Padi Sawah Di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. *Journal of Scientech Research and Development*, 2(1), 7–15.
- Dumasari, D. (2020). *Pembangunan Pertanian Mendahulukan yang Tertinggal*. PUSTAKA PELAJAR.
- Handayani, A. (2020). Implementasi Program Penguatan Kelembagaan Petani di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. *Bumiphala: Jurnal Pengembangan Daerah*, 1(1), 12–18.
- Ikhsan, M., Rukmana, D., Fahmid, I. M., & Tenriawaru, A. N. (2023). *Impact Of Establishing A Farmer Cooperative To Reach The Welfare Of Farmers In Indonesia*. *Proceedings of the International Conference on Agriculture*, 7(02).
- Lagiman, L. (2021). *Pertanian Berkelanjutan: Untuk Kedaulatan Pangan Dan Kesejahteraan Petani*.

- Nasrul, W. (2012). Pengembangan kelembagaan pertanian untuk peningkatan kapasitas petani terhadap pembangunan pertanian. *Menara Ilmu*, 3(29), 166–174.
- Rukhsan, M. (2021). *Dukungan Kelembagaan Dalam Pengembangan Agribisnis Bawang Merah= Institutional Support In Onion Agribusiness Development*. Universitas Hasanuddin.
- Saridakis, G., Georgellis, Y., Torres, R. I. M., Mohammed, A.-M., & Blackburn, R. (2021). From subsistence farming to agribusiness and nonfarm entrepreneurship: Does it improve economic conditions and well-being? *Journal of Business Research*, 136, 567–579.
- Sedana, G. (2019). Menuju Pembangunan Pertanian Berkelestarian. *Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali*, 8–15.
- Sibuea, M. B., Sibuea, F. A., Pratama, I., Siregar, G., & Putra, Y. A. (2022). *Analysis of the contribution of agribusiness microfinance institutions and government policies on increasing farmers' income in Indonesia*.
- Syofian, S., Sujianto, S., & Handoko, T. (2020). Modal sosial kelembagaan petani karet di Kabupaten Kuantan Singingi. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 5(1), 52–59.